

**PENERAPAN ASAS YURISDIKSI  
EKSTRATERITORIAL UNTUK KEJAHATAN  
PEMBAJAKAN KAPAL DI ZONA LAUT LEPAS**



**Di Susun Oleh:**  
**ADITYA BAGUS PERMANA**  
**NPM:20300071**

**PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA  
2023**

**PENERAPAN ASAS YURISDIKSI  
EKSTRATERITORIAL UNTUK KEJAHATAN  
PEMBAJAKAN KAPAL DI ZONA LAUT LEPAS**



**Di Susun Oleh:**

**ADITYA BAGUS PERMANA**

**NPM:20300071**

**PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA  
2023**

**PENERAPAN ASAS YURISDIKSI  
EKSTRATERITORIAL UNTUK KEJAHATAN  
PEMBAJAKAN KAPAL DI ZONA LAUT LEPAS**

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH  
GELAR SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM  
SARJANA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA

SURABAYA



Di Susun Oleh:

**ADITYA BAGUS PERMANA**

NPM:20300071

Surabaya, 28 DESEMBER 2023

MENGESAHKAN

DEKAN,

Dr. Umi Euggarsasi, S.H., M.Hum.

PEMBIMBING,

Dr. Ria Tri Vinata, SH.,LLM.

**PENERAPAN ASAS YURISDIKSI  
EKSTRATERITORIAL UNTUK KEJAHATAN  
PEMBAJAKAN KAPAL DI ZONA LAUT LEPAS**

DIPERSIAPKAN DAN DISUSUN

OLEH:

**ADITYA BAGUS PERMANA**

NPM : 20300065

TELAH DI PERTAHANKAN

DI DEPAN DEWAN PENGUJI PADA TANGGAL 31 JANUARI 2024

DAN DI NYATAKAN TELAH MEMENUHI PERSYARATAN

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

1. **Masitha Tismananda Kumala, SH.,MH.** (KETUA) 1. ....



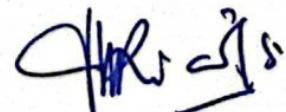
2. **Dr. Peni Jati Setyowati, SH.,MH**

(ANGGOTA) 2



3. **Dr. Ria Tri Vinata, SH.,LLM**

(ANGGOTA) 3



7. Untuk orang tua tercinta, Wahyu Iswandy dan Ika Petriana Sulistyowati, serta kakak saya Andrea Karuniawan dan keluarga besar senantiasa memberikan dorongan moral maupun materiil dan doa yang tak ada hentinya.
8. Teruntuk teman penulis Gali Rakasiwi, I Putu Indra Satria Wijaya, Farid Naufal Hardiansyah, terimakasih sudah menjadi teman yang selalu ada dan membantu saya ketika kesulitan
9. Teman-teman Angkatan 2020, Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang selalu saling support dari awal perkuliahan sampai lulus.
10. Dan semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah membantu penyelesaian skripsi ini baik lewat pemikiran, semangat, doa, dan semoga kebaikan kembali pada kalian semua.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan, penulis menghargai segala bentuk masukan dan kritik yang bersifat membangun dari semua pihak. Tidak ada kata yang dapat penulis berikan kepada mereka semua selain ucapan terima kasih sebanyak-banyak nya dan amat dalam semoga dalam nama Tuhan Yang Maha Esa mereka semua dibalas dengan kebaikan dan rejeki yang melimpah

Surabaya, 25 Desember 2023

Hormat saya



Aditya Bagus Permana

## **SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS**

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Aditya Bagus Permana  
NPM : 20300065  
Alamat : Perumahan Citra Garden Cluster Greenhill 15 No 5 Kota Sidoarjo, Jawa Timur.  
No.Telp/HP : 0895367269407

Menyatakan bahwa penelitian saya berjudul "PENERAPAN ASAS YURISDIKSI EKSTRATERITORIAL UNTUK KEJAHATAN PEMBAJAKAN KAPAL DI ZONA LAUT LEPAS" adalah murni gagasan yang belum pernah saya publikasikan di media, baik majalah maupun jurnal ilmiah dan bukan tiruan (plagiat) dari karya orang lain. Apabila ternyata nantinya ditemukan adanya unsur plagiarisme maupun autoplagiarisme, saya siap menerima sanksi akademik yang akan dijatuahkan oleh Fakultas. Demikian pernyataan ini saya buat sebagai bentuk pertanggungjawaban etika akademik yang harus di junjung tinggi di lingkungan Perguruan Tinggi.

Surabaya, 1 Agustus 2023

Yang menyatakan,



(Aditya Bagus Permana)

NPM :2030071

## Abstrak

Pengaturan hukum tentang pembajakan ini sangatlah penting ketika menghadapi kejadian tersebut dimanapun. Pembajakan kapal di laut lepas merupakan ancaman serius terhadap keamanan maritim global. Pada saat yang sama, tantangan hukum muncul ketika tindakan pembajakan dilakukan di wilayah yang tidak tunduk pada yurisdiksi suatu negara tertentu. Skripsi ini membahas tentang penerapan yurisdiksi ekstrateritorial sebagai mekanisme hukum untuk mengatasi permasalahan pembajakan kapal di wilayah internasional. Penelitian ini melibatkan analisis terhadap kerangka hukum internasional yang relevan, termasuk Konvensi PBB tentang Hukum Laut 1982. Fokus utama adalah pada konsep yurisdiksi ekstrateritorial yang memungkinkan negara-negara untuk mengejar dan mengadili para pelaku pembajakan, bahkan ketika tindakan tersebut terjadi di luar yurisdiksi mereka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan yurisdiksi ekstrateritorial dapat menjadi instrumen efektif dalam penanggulangan pembajakan kapal di laut lepas. Melalui kerjasama internasional dan perjanjian bilateral, negara-negara dapat saling mendukung untuk menghadapi tantangan ini secara bersama-sama. Namun, terdapat juga beberapa tantangan hukum dan praktis yang perlu diatasi, seperti koordinasi antara yurisdiksi yang berbeda dan keberlanjutan kerjasama internasional. Skripsi ini memberikan wawasan tentang pentingnya penerapan yurisdiksi ekstrateritorial dalam konteks penanggulangan pembajakan kapal di laut lepas, dengan harapan dapat menjadi dasar untuk pengembangan kebijakan dan praktik hukum yang lebih efektif dalam mengatasi ancaman terhadap keamanan maritim global.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Yurisdiksi Ekstrateritorial, Kapal

## Abstract

Legal regulations regarding piracy are very important when dealing with this incident anywhere. Ship piracy on the high seas is a serious threat to global maritime security. At the same time, legal challenges arise when acts of piracy are committed in territories that are not subject to the jurisdiction of a particular country. This thesis discusses the application of extraterritorial jurisdiction as a legal mechanism to overcome the problem of ship piracy in international areas. This research involves an analysis of the relevant international legal framework, including the 1982 UN Convention on the Law of the Sea. The main focus is on the concept of extraterritorial jurisdiction which allows states to pursue and prosecute perpetrators of piracy, even when the acts occur outside their jurisdiction. The research results show that the application of extraterritorial jurisdiction can be an effective instrument in dealing with ship piracy on the high seas. Through international cooperation and bilateral agreements, countries can support each other to face these challenges together. However, there are also several legal and practical challenges that need to be overcome, such as coordination between different jurisdictions and the sustainability of international cooperation. This thesis provides insight into the importance of the application of extraterritorial jurisdiction in the context of countering ship piracy on the high seas, with the hope that it can become a basis for developing more effective legal policies and practices in overcoming threats to global maritime security.

Key Words : Legal Protection, Extraterotrial Jurisdiction, Ships

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL.....</b>	<b>I</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>III</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN DEWAN PENGUJI SKRIPSI.....</b>	<b>IV</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>V</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS .....</b>	<b>VII</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>VIII</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>X</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>1.1 Latar Belakang.....</b>	<b>1</b>
<b>1.2 Rumusan Masalah .....</b>	<b>10</b>
<b>1.3 Tujuan Penelitian .....</b>	<b>10</b>
<b>1.4 Manfaat Penelitian.....</b>	<b>10</b>
<b>1.5 Kerangka Konseptual.....</b>	<b>11</b>
<b>1.6 Metode Penelitian.....</b>	<b>25</b>
<b>1.7 Pertanggungjawaban Sistematika.....</b>	<b>28</b>
<b>BAB II Penerapan Asas Yurisdiksi Ekstrateritorial Terhadap Kapal</b>	
<b>Berbendera Suatu Negara Yang Berada Di Zona Laut Lepas.....</b>	<b>30</b>
<b>2.1 Peran PBB dan Organisasi Internasional Lainnya Dalam Memberikan Perlindungan Tambahan Terhadap Kapal.....</b>	<b>37</b>
<b>2.2Penerapan Yurisdiksi Ekstrateritorial di Wilayah Laut Negara Gagal...41</b>	
<b>2.3 Penerapan Yurisdiksi Ekstrateritorial di Wilayah Laut Negara Berdaulat.....</b>	<b>45</b>
<b>BAB III Penyelesaian Sengketa Pembajakan Kapal di Zona Laut Lepas.....49</b>	
<b>3.1 Persamaan Penyelesaian Sengketa Pembajakan Dalam Dua Kasus Berbeda.....</b>	<b>53</b>
<b>3.2Alat dan Berbagai Metode Untuk Melindungi Kapal Ketika Melewati Perairan Rawan Bajak Laut.....</b>	<b>56</b>
<b>3.3 Bentuk Kerjasama Militer Negara Bendera Dan Organisasi Internasional dalam Menjaga dan Melindungi Keamanan Kapal di Laut Lepas.....</b>	<b>61</b>
<b>BAB IV</b>	
<b>4.1 Kesimpulan.....</b>	<b>65</b>
<b>4.2 Saran.....</b>	<b>66</b>
<b>DAFTAR</b>	
<b>PUSTAKA.....</b>	<b>68</b>

